Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5148-5165

The Influence of Accountability, Transparency, and Supervision on Budget Performance at PT PLN (Persero) UP3 Kupang

Pengaruh Peranan Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang

Agnes Kidi Beda Mudamakin[a*], Tiffany Natalia Petronela Gah[b]
Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang[a,b]
agnesbetan.mudamakin@gmail.com[a], tiffanygah@gmail.com[b]

Abstract

Effective financial management is a fundamental pillar of a company's operational success, including state-owned enterprises such as PT PLN (Persero). The Customer Service Implementation Unit (UP3) Kupang, as one of PLN's operational units in the East Nusa Tenggara region, holds significant responsibility in ensuring that budget realization aligns with predetermined targets. Optimal budget performance cannot be separated from the implementation of good governance principles, including accountability, transparency, and supervision. This study aims to examine the effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance at PT PLN (Persero) UP3 Kupang, both partially and simultaneously. The research employs a quantitative approach using a purposive sampling technique, involving 45 respondents as the research sample. Primary data were collected through questionnaire distribution, and data analysis was conducted using SPSS 31 software. The results indicate that accountability has a positive and significant effect on budget performance (Sig. 0.003 < 0.05), as do transparency (Sig. 0.014 < 0.05) and supervision (Sig. 0.001 < 0.05). Simultaneously, these three variables also demonstrate a positive and significant effect on budget performance (Sig. 0.001 < 0.05). These findings suggest that strengthening accountability, transparency, and supervision collectively contributes significantly to improving the quality of budget performance within PT PLN (Persero) UP3 Kupang.
Keywords: *Accountability, Transparency, Supervision, Budget Performance*

Abstrak

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan operasional perusahaan, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT. PLN (Persero). Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kupang sebagai salah satu unit operasional PLN di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Kinerja anggaran yang optimal tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di antaranya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang, baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 45 responden sebagai sampel penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran (Sig. 0,003 < 0,05), begitu pula transparansi (Sig. 0,014 < 0,05) dan pengawasan (Sig. 0,001 < 0,05). Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran (Sig. 0,001 < 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja anggaran di lingkungan PT. PLN (Persero) UP3 Kupang.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Kinerja Anggaran

1. Pendahuluan

Sebagai organisasi sektor publik, BUMN dituntut untuk mengelola keuangan secara baik guna memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 2003 telah

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

menetapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), yakni penyusunan anggaran yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Namun, efektivitas penganggaran berbasis kinerja tidak akan tercapai secara maksimal tanpa ditopang oleh fondasi tata kelola perusahaan yang kuat. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. GCG sendiri merupakan kerangka kerja yang mengatur struktur dan mekanisme operasional organisasi dalam mencapai tujuannya (Novitasari, 2021). Kerangka ini mencakup prinsip transparansi yang menekankan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang relevan, serta prinsip akuntabilitas yang memastikan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan agar berjalan secara efektif (Orchad, 2016).

Penerapan GCG di Indonesia mulai mendapat perhatian serius sejak krisis ekonomi 1997, ketika pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep tersebut di lingkungan perusahaan milik negara, salah satunya PT. PLN (Laode dan Ridzal, 2022). PT. PLN (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang energi listrik dan menjadi satu-satunya penyedia layanan kelistrikan di Indonesia dengan kepemilikan modal yang mayoritas berada di tangan pemerintah (Firmansyah dan Machmud, 2024). Sebagai salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional, keberadaan BUMN seperti PLN memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan dapat terus terjaga (Aryani, 2023).

Berikut merupakan data awal yang didapat yaitu hasil laporan penggunaan anggaran PT. PLN (Persero) UP3 periode 2020-2024

Tabel 1. Hasil Laporan Penggunaan Anggaran PT. PLN (Persero) UP3 periode 2020-2024

Tahun	Data Tahunan Penggunaan Anggaran (%)		
	Beban	**Kapasitas**	**Permintaan**
2020	99,61	28,23	14,91
2021	44,31	29,65	31,69
2022	51,81	32,35	26,78
2023	51,19	33,54	26,26
2024	52,51	30,76	26,79

Fluktuasi realisasi anggaran yang terjadi setiap tahun pada suatu instansi perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian, mengingat penggunaan anggaran cenderung mengalami perubahan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, dinamika perubahan dan pertumbuhan penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan dalam proses penilaian kinerja keuangan.

Berdasarkan pengamatan awal di PT. PLN (Persero) UP3 Kupang, penerapan prinsip transparansi dinilai masih belum optimal, tercermin dari kurangnya keterbukaan informasi terkait anggaran perusahaan. Padahal, transparansi merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan anggaran yang baik sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai (Laoli, 2019). Selain transparansi, tercapainya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran juga memerlukan pengawasan yang memadai, baik dari atasan secara langsung, badan legislatif, maupun lembaga pengawas yang secara khusus dibentuk untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pengawasan yang efektif akan mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini sejalan dengan konsep *Value for Money* yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), yakni pendekatan pengelolaan organisasi sektor publik yang berlandaskan pada tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kualitas penganggaran di sektor publik. Oleh karena itu, berbagai kasus pengelolaan anggaran yang kurang baik menegaskan bahwa pelaksanaan penganggaran di sektor publik harus senantiasa didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *Value for Money* secara terpadu.

Setiap unit operasional PT. PLN (Persero) merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kelistrikan di berbagai daerah seluruh Indonesia. Salah satu unit yang berada di bawah naungan PT. PLN (Persero) Pusat adalah PT. PLN (Persero) UP3 Kupang, yakni unit pelaksana di bawah Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah usaha meliputi Kota Kupang dan sekitarnya. Mengingat listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan PT. PLN (Persero) UP3 Kupang memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik bagi warga Kota Kupang. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pada unit ini harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Terkait dengan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian Budiarto (2020) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dalam konsep *value for money*. Sebaliknya, penelitian Veronika (2023) justru menemukan hasil yang berbeda, di mana akuntabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dalam kerangka konsep yang sama. Adanya inkonsistensi temuan antara kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran dapat bervariasi tergantung pada konteks dan lingkungan organisasi yang diteliti. Kesenjangan hasil penelitian ini memperkuat urgensi dilakukannya kajian lanjutan, khususnya dalam konteks PT. PLN (Persero) UP3 Kupang, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara akuntabilitas dan kinerja anggaran di lingkungan BUMN daerah.

2. Kajian Pustaka

Kinerja Anggaran

Definisi kinerja menurut Mahmudi (2005: 6), yaitu sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), hal tersebut dikarenakan hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan dan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusi ekonomi. Mardiasmo (2002: 61), mengatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

kinerja anggaran merupakan kerja yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi dan kepuasan, yang pelaksanaannya didukung oleh anggaran sebagai acuan kerja dan sistematis yang mengatur alokasi sumber daya untuk mencapai target kegiatan dan mengelola penerimaan serta pengeluaran dalam periode tertentu.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah (Romanda & Dwiyant, 2021 : 72):

a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya
b. Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

Penggukuran utama kinerja pada organisasi sektor publik adalah *value for money* (Laoli, 2019: 92). Menurut Mardiasmo, (2018: 5), *Value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Penilaian kinerja pemerintah tidak hanya tergantung oleh *output* saja, tetapi wajib menimbang *input, output,* serta hasil dengan serentak. Kekuatan organisasi sektor publik meminimalkan sumber daya yang dipergunakan, menghindari pengeluaran konsumtif dan kurang berguna merupakan maksud dari ekonomis (Sari dkk, 2022: 92). Perbandingan masukan dan keluaran yang berkaitan dengan target yang ditetapkan merupakan efisiensi. Dan tingkat tercapainya hasil program dengan target yang ditetapkan adalah cakupan dari efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2018: 164), *Value for Money* dapat dibagi menjadi dua bagian indikator, yaitu:

a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
   Ekonomi artinya, pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah- rendahnya (*spending well*).
b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
   Kualitas pelayanan (efektivitas), Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode *value for money,* selain penilaian finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas.

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2019: 9), akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala agktivitas kegiatan yang beriakitan dengan penggunaan sumber daya publik. Menurut Standar

Akuntansi Pemerintahan PP No. 24 Tahun 2005, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.

Sedangkan menurut Veronika & Nugraeni (2023: 941), Kewajiban mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh hal yang menjadi kewajibannya pada pihak utama yang memegang hak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban merupakan arti dari akuntabilitas.

Menurut Solihin dalam Novitasari & Harsasto (2019: 4) indikator akuntabilitas adalah:

a. Kesesuaian standar pelaksanaan dengan kenyataannya.
   Hal ini merujuk pada sejauh mana organisasi dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, serta sejauh mana realitas pelaksanaan mencerminkan atau mematuhi standar tersebut.
b. Terdapat sanksi atas kelalaian oleh tim pelaksana
   Yakni untuk memastikan keuangan dikelola dengan baik dan pihak yang melanggar mendapatkan sanksi yang ditentukan atas penyelewengan pelaksanaan, yaitu kembali pada konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan untuk individu maupun kelompok pada pedoman yang sudah ditetapkan bersama oleh organisasi.
c. Terdapat laporan pertanggungjawabaan
   Guna mengukur keberhasilan program yang telah dijalankan sebab menjalankan amanah harus disertai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Transparansi

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010), Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Laoli (2019: 92), Transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Menurut Kristianten dalam Ismiatun (2024: 28-29), transparansi mengarah pada pemberian dan penyediaan informasi untuk masyarakat umum. Indikator yang dapat digunakan pada prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

a. Keterbukaan proses
   Yaitu bagaimana organisasi sektor publik dapat menyediakan informasi yang akurat dengan akses yang mudah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun pihak yang memiliki wewenang dalam memperoleh informasi terkait rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir dengan pertanggungjawaban kegiatan.
b. Informasi jelas dan lengkap.
   Yaitu penyediaan informasi yang mudah dipahami dan tidak ambiguitas, relevan tidak terlambat karena dapat mengurangi nilai atau dampaknya, serta informasi tersebut terpercaya, memastikan informasi yang disampaikan adalah benar

adanya dan lengkap disertai adanya informasi detail keuangan desa, dan laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa.

c. Keterbukaan akses informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan sektor publik.
   Adalah kemudahan akses bagi publik dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan. Dengan menerapkan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan sektor publik, akan meningkatkan kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat.
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
   Yaitu upaya dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah rencana anggaran dan diberi hak untuk bersuara.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dinamika pemeriksaan secara keseluruhan menyangkut semua aktivitas pemerintahan dengan tujuan agar seluruh aktivitas/proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Salah satu aspek dalam pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya.

Berarti tujuan pengawasan pada dasarnya untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, sehingga apabila terdapat indikasi- indikasi penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan (Setiyanningrum, 2017: 27).

Dalam Setiyanningrum (2017: 27), Secara umum terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan, yaitu:

a. Input pengawasan
   Input/masukan pengawasan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.
b. Proses pengawasan
   Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
c. Output pengawasan
   Output/keluaran pengawasan adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya.

Pengembangan Hipotesis dan kerangka pemikiran Teoritis

Hipotesis merupakan dugaan/jawaban sementara terhadap ringkasan masalah penelitian yang diuraikan dengan sebuah kalimat pertanyaan, kajian pustaka dan penelitian terdahulu (Sugiyono, 2019: 63). Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Adanya akuntabilitas berarti memberikan ruang bagi publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai alat ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Penelitian dari Aprianti dan Nur (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian Barokah dan Paulus (2023) Dimana akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pada suatu entitas dalam menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil, memberikan pengaruh pada kinerja anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis.

H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Transparansi adalah keterbukaan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diterbitkan secara berkala, dan agar publik mengetahui kemajuan proses pemerintahan (Budiarto & Puspitasari, 2020). Adanya transparansi mengakibatkan masyarakat menjadi semakin kritis dalam menanggapi setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengendalian terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian dari Pinki dan Nugraeni (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Hal ini didukung oleh penelitian Ashari dkk., (2020) bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, serta menurut penelitian Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015), secara stimultan dan parsial transparansi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi informasi maka semakin bagus pula kinerja anggaran.

H2: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja anggaran.

Pengaruh pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

Pengawasan sendiri berarti menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi dan membandingkannya dengan peristiwa yang seharusnya terjadi. Adanya pengawasan ini mampu mencegah praktik-praktik menyimpang, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja anggaran

Penelitian dari Anis Iffa Satriani (2022) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pramita (2024) bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dana desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan yang baik maka kinerja anggaran akan semakin baik.

H3: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran.

Hasil penelitian dari Puspitasari dan Budiarto (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan akan membuat kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* menjadi baik.

H4: Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran.

3. Metode

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:37), metode penelitian kuantitatif yaitu metode gambaran statistik yang berupa angka-angka dan analisis berupa statistik untuk melakukan analisis data penelitian tanpa menyusun kesimpulan. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random sehingga kesimpulan penelitian dapat digeneralisasi pada populasi dimana sampel itu diambil.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang bekerja pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang.

Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan membagikan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019: 142).

Daftar pernyataan yang dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel, dengan tujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang ada pada kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Kupang.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019: 80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada kantor PT. PLN (Persero) UP3 Kupang. Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Kupang memiliki cabang unit dibawahnya dengan total unit sebanyak 8 unit. Total jumlah keseluruhan pegawai di PT. PLN (Persero) UP3 Kupang berjumlah 159 orang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sugiyono, 2019: 85). Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, maka digunakan teknik pengambilan sampel dengan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2011: 85), *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria penentuan sampel penting dilakukan agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi dan data yang diperoleh valid serta reliabel. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden harus pegawai yang aktif dan berada di lingkungan kantor pusat yang terkait langsung dengan pengelolaan anggaran.
b. Responden diambil dari pegawai kantor yang tidak berada di lapangan.
c. Responden harus merupakan pegawai yang memiliki kegiatan, tugas, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, seperti di bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, Transaksi Energi Listrik, Konstruksi, Pemasaran, Pengadaan, dan Jaringan.

Tabel 2. Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Kupang

No.	**Kantor PT. PLN (Persero) UP3 Kupang**	
	Bidang	**Jumlah Pegawai**
1.	Perencanaan	4 Orang
2.	Keuangan Dan Umum	7 Orang
3.	Transaksi Energi Listrik	7 Orang
4.	Konstruksi	8 Orang
5.	Pemasaran	6 Orang
6.	Pengadaan	2 Orang
7.	Jaringan	11 Orang
Jumlah		**45 Orang**

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	**Definisi Operasional**	**Indikator Variabel**	**Skala**
Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* (Y)	Suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (output) yang didasarkan pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas	1. Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) 2. Kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo (2002)	Likert
Akuntabilitas (X1)	Pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah.	1. Kesesuaianstandar pelaksanaan dengan kenyataannya. 2. Terdapat sanksi atas kelalaian oleh tim pelaksana. 3. Terdapat laporan pertanggungjawabaan. (Solihin 2007)	Likert

Transparansi (X2)	Transparansi merupakan keterbukaan yang menyeluruh dan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif pada proses pengelolaan dana dan sumberdaya publik.	1. Keterbukaan proses. 2. Informasi jelas dan lengkap. 3. Keterbukaan akses informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan sektor publik. 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. (Kristianten dalam Ismiatun, 2024)	Likert
Pengawasan (X3)	Suatu proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas pemerintahaan dengan tujuan agar aktivitas	1. Input(masukan) Pengawasan 2. Proses pengawasan. 3. Output (keluaran) pengawasan. 4. (Setiyanningrum, 2017)	Likert

Sugiyono (2019:107), menjelaskan bahwa Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap item dari masing- masing variabel dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Pengukuran

No	Pernyataan	Poin
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	diberi skor 1 / skor 4
2.	Tidak Setuju (TS)	diberi skor 2 / skor 3
3.	Setuju (S)	diberi skor 3 / skor 2
4.	Sangat Setuju (SS)	diberi skor 4 / skor 1

Sumber: Sugiyono, 2019: 108

Teknik Analisis Data

Uji Instrumen

a. Uji Validitas
   Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kusioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan (indikator) pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021: 52). Biasanya syarat minimum untuk memenuhi syarat adalah kalau r = 0,30 (r hitung ≥ r kritis). Jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
b. Uji Reliabilitas
   Uji reliabilitas adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang tehadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021: 47). Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Menurut Ghozali (2021: 48), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60" atau 60%.

4. Hasil Dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas digunakan untuk meyakinkan bahwa variabel yang dibandingkan rata-ratanya mengikuti sebaran atau distribusi normal. Dasar dari pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pada taraf signifikan hasil perhitungan dengan ketentuan, probabilitas > 0,05 : Hipotesis diterima karena data terdistribusi secara normal sebaliknya jika probabilitas < 0,05 : Hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikoliniearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai *tolerance,* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Apabila tolerance value > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi bebas dari multikoliniearitas, dan sebaliknya, jika tolerance value < 0,10 dan nilai VIF >, maka terjadi multikoliniearitas yang tinggi diantara variabel bebas Ghozali (2021: 48).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji ada tidaknya kejadian ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi (Sugiyono, 2019). Jika varians dari pengamatan tetap sama disebut homokedastisitas, namun jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang dikatakan baik adalah regresi homokedastisitas. Dasar dari pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas, namun sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heterokedastisitas. (Ghozali, 2021: 139).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Liniear Berganda

Analisis regresi ganda digunakan dan dipakai oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2019: 275). Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y= \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Anggaran
X1 = Akuntabilitas
X2 = Transparansi
X3 = Pengawasan

a = Konstanta
e = Error
β1, β2, β3 = Koefisien regresi yang menunjukan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t, dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika tingkat signifikasi t dari masing-masing variabel yang didapat dari hasil pengelolaan, nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka secara parsial variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.Jika tingkat signifikasi t dari masing-masing variabel yang didapat dari hasil pengelolaan, nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen (Ghozali, 2021: 98).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual (*goodness of fit*). Uji F digunakan untuk menguji variable independen mampu atau belum menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Jika tingkat signifikasi F yang didapat dari hasil pengelolahan, nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika tingkat signifikasi F yang didapat dari hasil pengelolahan, nilainya lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan (5%), maka diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021: 99).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) menjelaskan sejauh mana variabel dependen dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik model persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen yang digunakan. Namun, tidak ada pedoman pasti untuk menentukan seberapa besar nilai koefisien determinasi yang ideal, karena hal ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks penelitian yang berbeda (Ghozali, 2021: 97).

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap kinerja anggaran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,463 dan nilai signifikansi 0,03 maka koefisien regresi tersebut signifikan 0,03 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* (Y). *H_1 diterima.*

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang memiliki pemahaman yang cukup luas menyangkut pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan agen terhadap pemberi amanah. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas sangat

diperlukan sebagai alat ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran (Sitta dkk., 2023 : 3).

Sebagian besar pegawai menjawab setuju dan sangat setuju pada butir pertanyaan kuesioner sebesar 91,21%. Dapat dilihat pada mayoritas jawaban responden pada butir pernyataan yakni "anggaran disajikan secara benar kepada seluruh pemangku kepentingan" dan "indikator hasil kinerja yang akan dicapai telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran". Sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Kupang secara menyeluruh dikatakan sudah baik. Namun, masih terdapat pernyataan kuesioner yakni "tahapan pengelolaan anggaran melibatkan stakeholder dan pemerintah" tidak menunjukkan hasil jawaban yang optimal. Sudah seharusnya pengelolaan anggaran melibatkan peran pemerintah agar tiap program perusahaan dapat berpengaruh kepada khalayak masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan penelitian Purnomo & Putri (2018), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Kota Bandung. Lain halnya dengan penelitian Veronika (2023), yang dimana variabel akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Transparansi memiliki nilai koefisien sebesar 0,299 dan nilai signifikansi 0,014 maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena 0,014 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja anggaran (Y). *H_2 diterima.*

Transparansi adalah keterbukaan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi, adanya laporan pengelolaan anggaran yang diterbitkan secara berkala, dan agar publik mengetahui kemajuan proses pemerintahan (Budiarto & Puspitasari, 2020: 154). Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik (Purnomo & Putri, 2018 470).

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Ramadhan, 2025:43). Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga- lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

Hasil dari jawaban responden dilihat pada mayoritas jawaban responden yang menunjukkan sangat setuju sebesar 48,32% dan setuju sebesar 37,73% pada pernyataan "stakeholder/pemangku kepentingan mudah untuk mengakses dokumen perusahaan tentang RKAP" dan "pemangku kepentingan dapat memberikan kritik dan saran terhadap hasil kinerja RKAP". Dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai PT. PLN (Persero) UP3 sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait keterbukaan organisasi memberikan informasi perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan Kaukab (2020), yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian Laoli (2019), yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada pemerintahan kabupaten Nias.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Pengawasan memiliki nilai koefisien sebesar 0,652 dan nilai signifikansi 0,001 maka koefisien regresi tersebut signifikan (0,001 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran (Y). *H_3 diterima.*

Pengawasan adalah proses pemantauan kinerja karyawan terhadap untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas tinjauan kinerja, dan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik atas pencapaian hasil. (Sari dkk., 2022: 176)

Dari responden yang telah menjawab, mayoritas jawaban setuju dan sangat setuju adalah sebesar 86,05% pada butir pernyataan yakni "pengawasan dapat mencegah pemborosan atau inefisiensi anggaran", "pimpinan secara rutin menilai kinerja bawahan penggunaan anggaran" dan "adanya pengawasan membuat kinerja RKAP menjadi semakin baik". Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan operasional pad PT. PLN (Persero) UP3 Kupang telah melaksanakan pengelolaan anggaran akan berorientasi ekonomis, efisien dan efektif. Responden juga telah memahami pentingnya suatu pengawasan karena dengan adanya suatu pengawasan dapat mencegah permasalahan yang akan timbul. Namun demikian, berdasarkan hasil jawaban responden terdapat jawaban responden yang sangat tidak setuju sebesar 0,26% dan tidak setuju sebesar 2,33% terhadap butir pernyataan "Saya berperan penuh dalam memberikan masukan saat penyusunan kebijakan anggaran", sebagian responden menjawab dengan sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat pegawai yang kurang memiliki pemahaman terhadap pernyataan tersebut yang dimana peranan pegawai sendiri menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran serta dapat membantu peningkatkan kualitas pengawasan yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Setyaningrum dan Purnomo (2018), yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh parsial terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money.*

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel independen yakni Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan memiliki nilai koefisien masing-masing sebesar 0,463, 0,299, 0,652 dan nilai signifikansi <0,001 > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Pengawasan Pengawasan (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja anggaran (Y). *H_4 diterima.*

Secara harfiah dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan mengenai kinerja anggaran dengan konsep *value for money* di PT. PLN (Persero) UP3 Kupang.

Hal ini didapat dengan mayoritas jawaban responden yakni jawaban sangat setuju sebesar 54,12% dan jawaban setuju sebesar 43,97% pada keseluruhan butir jawaban responden. Yang dimana tiap pernyataan mewakili nilai secara ekonomis, efeisiensi dan efektivitas dapat dilihat pada butir pernyataan bahwa "anggaran yang dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak efektif", "anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu" dan "anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan".

Pengimplementasian akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebagai prinsip dasar *good governance* tidak terlepas dari pencapaian tujuan perusahaan. Agar tujuan ini dapat tercapai, perlu adanya prinsip- prinsip yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran. Terbukti dengan ada nya 3 variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan) memiliki hubungan kontribusi sebesar 48,9% terhadap variabel dependen (kinerja anggaran dengan konsep *value for money*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna Setiyaningrum (2017) yang menyatakan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money.*

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang dengan nilai signifikasi sebesar 0,003 < 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas telah diimplementasikan dengan sangat memandai.
b. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang dengan nilai signifikasi sebesar 0,014 < 0,005. Pegawai PT. PLN (Persero) UP3 Kupang sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait keterbukaan organisasi memberikan informasi perusahaan.
c. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 < 0,005. Responden telah memahami pentingnya suatu pengawasan karena dengan adanya suatu pengawasan dapat mencegah permasalahan yang akan timbul.
d. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,005. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, transparansi dan pengawasan maka semakin baik pula kinerja anggaran.

Saran

a. Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan yang diberikan, masih ada beberapa pegawai yang memiliki pemahaman kurang terhadap pentingnya

akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sehingga disarankan kepada PT. PLN (Persero) UP3 Kupang untuk meningkatkan pemahaman pegawai berkenan dengan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi secara terus menerus.

b. PT. PLN (Persero) UP3 Kupang harus menerapkan akuntabilitas dengan lebih optimal pada pengelolaan anggaran dengan melibatkan peran pemerintah agar tiap program perusahaan dapat berpengaruh kepada khalayak masyarakat.
c. PT PLN (Persero) UP3 Kupang harus lebih memberikan edukasi dan pelatihan bagi pegawai terhadap pentingnya peranan pegawai sebagai dasar penyusunan anggaran agar dapat membantu peningkatkan kualitas pengawasan yang baik.
d. Bagi penelitian selanjutnya akan lebih baik untuk menambah variabel yakni partisipasi dan kualitas laporan keuangan agar dapat menjelaskan secara lebih rinci dan lebih luas mengenai kinerja anggaran, dan juga diharapkan agar pengumpulan data tidak hanya kuesioner tetapi menggunakan tes wawancara agar hasil lebih akurat.

6. Daftar Pustaka

Amin, M., Maryadi, M., & Sjarlis, S. (2022). *Pengaruh Pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran.* Nobel Management Review. https://doi.org/10.37476/nmar.v3i3.3282

Aprianti, S., & Nur, A. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, *6*(12).

Aryani, R. (2023). *Tanggung Jawab PT.PLN Atas Jual Beli Tenaga Listrik Terhadap Konsumen (Studi Kasus di Pt. Pln Rayon Pringgabaya)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7581257

Batubara, Z., & Risna,R. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 4 No:1 95-109

Budiarto, D. S., & Puspitasari, M. D. (2020). M*eningkatkan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. A*ccounting Global Journal, *4*(2), 153–166. https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5099

Firmansyah, A., & Machmud, A. (2024). *Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri : Sebuah Kajian Hukum Korporasi*. *13*, 517–528. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ismiatun. (2024). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik menurut perspektif islam*. Skripsi

Laode, K., & Ridzal, N. A. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) UP3 Baubau*. Journal of Culture Accounting and Auditing, *1*(2), 27. https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i2.4832

Laoli, V. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias.* Owner, *3*(1), 91. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108

Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.

Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi Dan Governance, *1*(1), 57. https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66

Maolani, D. Y. (2023). *Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia.* Jurnal Ilmu Sosial, *21*(2), 3. http://jurnaldialektika.com/

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. CV Andi Offset.

Moediono, A. A., & Akbar, F. S. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Yang Berada Di Mall Pelayanan Publik Siola Kota Surabaya*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi, *6*(2), 615–625.

Nata, S., Krinhoe, D., & Priyatama, T. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Bkad Kabupaten Banyumas*. Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis (MIMB)*, Vol 21 No*.

Novitasari, A. D., & Harsasto, P. (2019). *Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam penerapan anggaran dana desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, *9*(1), 121–130. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290

Novitasari, M., Ardini, A. (2021). *Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value for Money sebagai Perwujudan Good Governance*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 10 No 9 .

Orchad, C. (2016). *Penerapan Good Corporate Governance Upaya Mewujudkan BUMN Yang Berbudaya.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, *11*(2), 259–271.http://tulisanwinahmengenaibepwinah.blogspot.co.id/2010/12/penerapan-good-corporate-governancedi.html

Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, *6*(3), 467–480. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886

Qosasi, A., & Riharjo, I. B. (2022). *Pengukuran Kinerja dalam Prespektif Value for Money pada Dinas Tenaga Kerja Surabaya.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 11 No 6

Romanda, C., & Dwiyant, I. J. D. J. (2021). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. J*urnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati, *9*(2), 70–78. https://doi.org/10.33024/jrm.v9i2.4319

Sari, Y., Nanda, S. T., Berty, I., & Raisya, Z. (2022). *Analisis value for money pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*. Jurnal Akuntansi Kompetif, *5*(1), 56–65. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i1.839

Setiyanningrum, I. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Skripsi, 162.

Sitta, B., Paulus, D., & Hadiprajitno, T. B. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta*. Diponegoro Journal of Accounting, *12*(4), 1–7. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.

Veronika, P., & Nugraeni, N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money.* Jurnal

Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi *(MEA)*. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3473

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). P*engaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemen.* Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA*)*, *7*(3), 978–988. https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475